



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
RESIKO OPERASIONAL  
TAHUN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA**

Jl. Yap Tjwan Bing no 24 Kel Jagalan Kec Jebres Kota Surakarta 57162

☎ (0271) 656 816 🌐 [dispangtan.surakarta.go.id](http://dispangtan.surakarta.go.id)

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian mengacu pada lima unsur pengendalian intern yang merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur operasional dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian, pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assesment (CSA)* dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran konkrit dalam pencapaian tujuan.

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19680223 199208 1 002

## DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
E. Struktur Organisasi.....	3
F. Pernyataan Tanggungjawab.....	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	5
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	6
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	7
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN .....	9
A. Penetapan Konteks/Tujuan .....	9
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	11
C. Hasil Analisis Risiko .....	18
D. Pengendalian yang sudah dilakukan.....	20
E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan.....	21
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	23
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	24
A. Pemantauan Berkelanjutan .....	24
B. Evaluasi Terpisah.....	25
C. Pelaksanaan Tindak Lanjut.....	25
D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP .....	25
BAB VI PENUTUP .....	26
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	
Lampiran 2 : Daftar Risiko Prioritas Teridentifikasi	
Lampiran 3 : Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	
Lampiran 4 : Rancangan Informasi dan Komunikasi Pengendalian	
Lampiran 5 : Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian	
Lampiran 6 : Register Risiko	
Lampiran 7 : Dokumentasi	

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

### **A. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi

penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- e. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Struktur Pengelolan Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian , dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

## **D. Ruang Lingkup**

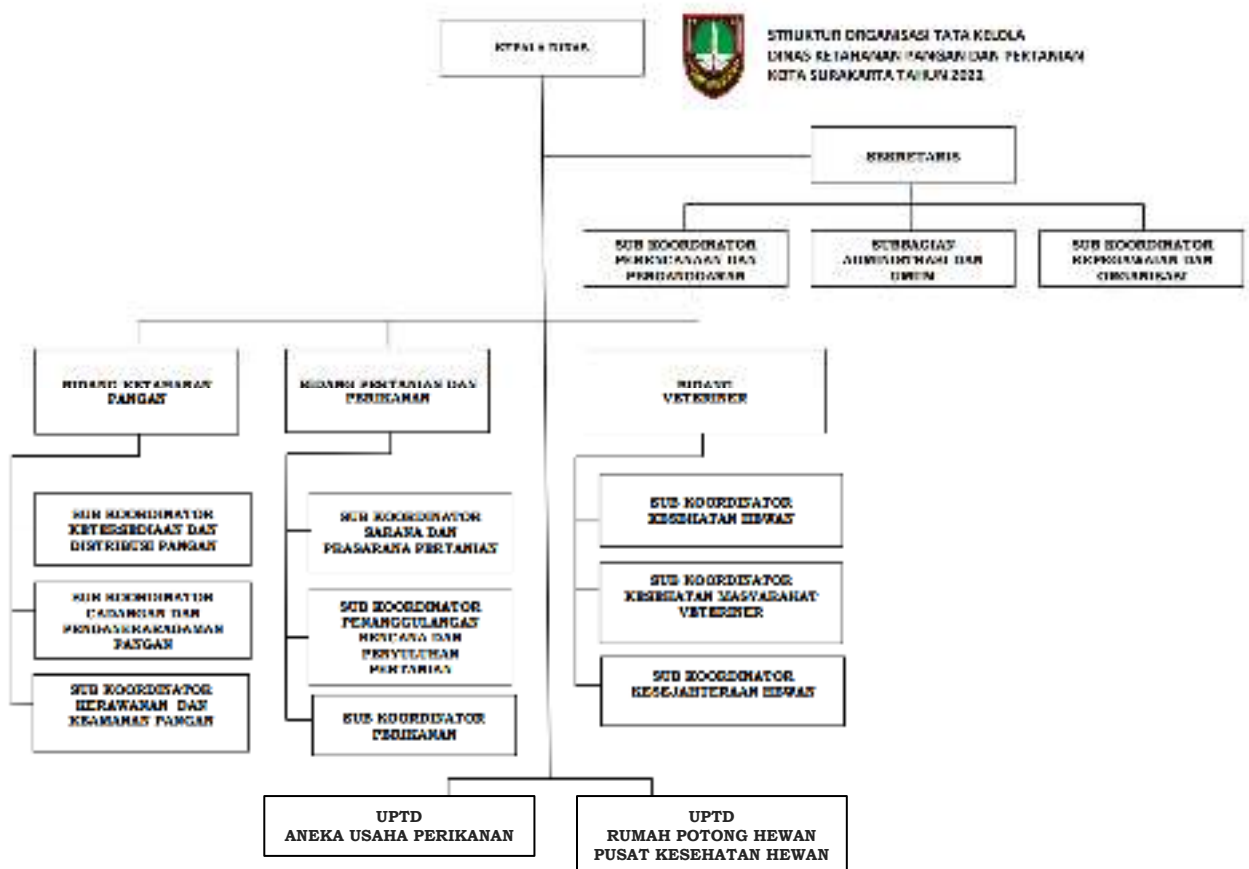
Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.



Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan terlaksana dalam tahun 2023.

### E. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :



### F. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## BAB II

### PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

---

Walikota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang memuat acuan pelaksanaan pengelolaan risiko dan pengendalian risiko di lingkungan Kota Surakarta. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Struktur Pengelolan Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang memiliki tugas menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Risiko Pemerintah Kota Surakarta untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Struktur Pengelolan Risiko telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang :

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.



## A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasi kannya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

## **B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

### **1. Kepemimpinan yang kondusif**

Pendaftaran online Puskesmas untuk dibenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap;

### **2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;**

Penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD TA. 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca LKPD TA. 2021 di UPT Rumah Potong Hewan

Kesimpulan atas kondisi lingkungan pengendalian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian sebagai berikut :

### **1. Kepemimpinan yang kondusif**

Pendaftaran online Puskesmas untuk dibenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sudah memiliki aplikasi dalam pendaftaran pasien, akan tetapi aplikasi saat ini sedang dalam perbaikan sehingga aplikasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena hal tersebut, maka pelayanan Puskesmas dalam pendaftaran pasien dilakukan secara manual, dan diperlukan komitmen pimpinan, terkait kualitas informasi pelayanan yang bersifat manual

### **2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;**

Bahwa berdasarkan hasil audit pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 atas Perbandingan Realisasi Anggaran kegiatan dengan Standar Satuan Harga terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.289.300,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

No	ATRIBUT/ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BELUM MEMADAI	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	Pemilik/ Penanggung Jawab	Tenggat Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>				
	Pendaftaran online Puskesmas untuk ditenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap	1. Perbaiki sistem pendaftaran online 2. Melengkapi sarana prasarana Puskesmas secara bertahap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	November 2022
<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>				
	Terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.289.300,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran segera menarik kelebihan pembayaran kepada pegawai bersangkutan sebesar Rp2.289.300,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya disetor ke Rekening Kas Daerah.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	November 2023

## BAB III

### PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

---

#### A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap program/kegiatan, risiko pada setiap program/kegiatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan OPD.

Penetapan Konteks/tujuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), telah menetapkan kegiatan dan indikator keluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan dilakukan penilaian risiko yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Indikator : Konsumsi energi perkapita
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Indikator : Konsumsi protein perkapita
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Indikator : Angka ketersediaan Energi
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  
Indikator : Angka Ketersediaan Protein
5. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan  
Indikator : Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap kebutuhan pangan
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia  
Indikator : Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan
7. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi  
Indikator : Kontribusi Energi sereal terhadap kelompok pangan (%)

8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  
Indikator : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota -  
Indikator : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Indikator : Populasi ternak
11. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  
Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
12. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain  
Indikator : Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
Indikator : Program Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)
14. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota  
Indikator : Prosentase kejadian/kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali
15. Program Perizinan Usaha Pertanian  
Indikator : Persentase seluruh perizinan usaha pertanian yang diterbitkan
16. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator : Persentase Izin Usaha Pertanian yang
17. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat risiko yang mengancam pencapaian tujuan, sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
1	1	1	1	5
	Tujuan Strategis OPD : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil			
	Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman			
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi menurun	Harga pangan yang naik menyebabkan tingkat konsumsi protein menurun	Konsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/kap/hari
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi protein belum ideal	Harga pangan yang naik menyebabkan tingkat konsumsi protein menurun	Konsumsi energi kurang dari 57 gram/kap/hari
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi kurang	Prediksi iklim yang mempengaruhi produksi pangan di daerah pemasok yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Surakarta	Ketersediaan pangan terganggu



No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
1	1	1	1	5
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan protein kurang	Prediksi iklim yang mempengaruhi produksi pangan di daerah pemasok yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Surakarta	Ketersediaan pangan terganggu
5	Sub Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan ketersediaan kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya	Data ketersediaan kurang valid dan tidak tepat waktu; tidak semua distributor dapat memberikan data	Data yang disajikan hanya berupa perkiraan
6	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Toko Mitra Tani yang dikembangkan dipengaruhi oleh Jumlah Fasilitas Distribusi	Menurunnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan murah	TTI tidak bisa dikembangkan
7	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tidak seimbangnya kontribusi energi dari sereal terhadap kelompok pangan lainnya	Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi beras masih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain (jagung, kentang, ketela pohon, ketela rambat dll)	Ketersediaan beras harus selalu ada dengan jumlah yang mencukupi
8	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi pangan lokal masih rendah	Konsumsi pangan lokal masih rendah	Masih kurangnya inovasi masyarakat dalam pengolahan pangan lokal.
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan	Penduduk rawan pangan belum	Kemampuan daerah dalam	Penduduk rawan pangan tidak

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
1	1	1	1	5
	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	semua tertangani	menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	semua dapat tertangani
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ternak banyak yang terkena penyakit dan mati	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak	Manajemen pemeliharaan ternak tidak berjalan secara maksimal
11	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penumbuhan kegiatan P2L yang rendah	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pertanian	Pemenuhan kebutuhan pangan dari P2L untuk stunting kurang
12	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Produksi bibit / benih berkurang karena indukan yang terbatas	Prosentase Keberhasilan benih / bibit yang dihasilkan menurun	Benih /bibit yang dihasilkan menurun
13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit hewan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	tidak dilakukan monitoring kegiatan pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit	Ternak mati dan terjadi penurunan populasi ternak
14	Sub Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	munculnya penyakit hewan baru atau reinfeksi penyakit hewan di suatu wilayah	tidak dilakukan monitoring perkembangan penyakit yang ditangani	terjadinya penularan penyakit dalam satu kandang/wilayah
15	Program Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan usaha tidak dapat terfasilitasi	persyaratan teknis dan administasi yang sulit terpenuhi	pelaku usaha tidak berizin
16	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sebagai kewajiban setelah izin usaha diterbitkan	Anggapan pelaku usaha bahwa setelah izin usaha keluar maka kewajiban sudah selesai	pelanggaran terhadap izin usaha

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
1	1	1	1	5
17	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan produk olahan ikan tidak sampai dikonsumsi balita stunting	Kurangnya pengetahuan orang tua balita stunting tentang nilai gizi ikan dari produk olahan ikan yang diberikan	Jumlah balita stunting tidak mengalami penurunan

### C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Analisis risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat nilai risiko, sebagai berikut :

RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsumsi energi menurun	2	2	4
Konsumsi protein belum ideal	3	3	13
Ketersediaan energi kurang	2	2	4
Ketersediaan protein kurang	2	2	4
Laporan ketersediaan kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya	3	3	13
Jumlah Toko Mitra Tani yang dikembangkan dipengaruhi oleh Jumlah Fasilitas Distribusi	2	2	4
Tidak seimbangnya kontribusi energi dari sereal terhadap kelompok pangan lainnya	2	2	4
Konsumsi pangan lokal masih rendah	2	3	6
Penduduk rawan pangan belum semua tertangani	3	3	13
Ternak banyak yang terkena penyakit dan mati	3	2	8
Penumbuhan kegiatan P2L yang rendah	3	3	13
Produksi bibit / benih berkurang karena indukan yang terbatas	3	2	8
Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit hewan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	3	2	8

RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)
munculnya penyakit hewan baru atau reinfeksi penyakit hewan di suatu wilayah	2	2	4
Perizinan usaha tidak dapat terfasilitasi	2	2	4
Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sebagai kewajiban setelah izin usaha diterbitkan	2	3	6
Bantuan produk olahan ikan tidak sampai dikonsumsi balita stunting	3	2	8

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Sampai dengan saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi B2SA, pemberian contoh menu B2SA;
2. Dilakukan pengecekan lapangan, mengundang distributor untuk memberikan pemahaman dan menyediakan google form untuk penyediaan data;
3. Sosialisasi kepada anak sekolah tentang menu pangan lokal dan pemberian contoh menu pangan lokal, pelatihan pengolahan pangan lokal kepada PKK, KMP, KWT;
4. Koordinasi dengan Dinsos mengenai data masyarakat rawan pangan, Penyusunan peta FSVA
5. Pendampingan dan monitoring kepada kelompok ternak
6. Desinfeksi pasar hewan, RPH dan unit usaha hewan
7. Pengawasan persyaratan izin usaha yang sudah terdaftar di aplikasi perizinan.
8. Produk olahan langsung diberikan kepada balita stunting.
9. Pelatihan tematik P2L, Monitoring P2L
10. Memberikan bantuan ternak ayam

#### E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan

Rencana Tindak Pengendalian merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor. Adapun kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :

1. Balita stunting langsung mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi Menambah volume sosialisasi dan pemberian contoh menu B2SA;
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait data ketersediaan pangan.
3. Penerapan SE Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbauan pangan local;
4. Update data penduduk rawan pangan.
5. Koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan.
6. Menambah volume desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha
7. Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan di Kota Surakarta.
8. Balita stunting langsung mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi
9. Pendampingan dari mulai CPCL sampai pasca panen.
10. Pemberian pendampingan kepada kelompok ternak

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

---

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Informasi dan komunikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Usulan menambah anggaran melalui renja perubahan 2024
2. Rapat koordinasi dengan Tim TPID terkait ketersediaan data pangan
3. Surat himbauan konsumsi pangan lokal
4. Surat permohonan data ke Dinsos tentang data penduduk rawan pangan
5. Melakukan rapat koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan
6. Menyusun Jadwal Pelaksanaan kegiatan desinfeksi pasar ternak/RPH dan Unit Usaha
7. Rapat koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan
8. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan materi sosialisasi konsumsi olahan ikan
9. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan P2L
10. Laporan pendampingan kelompok ternak



## BAB V

### RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

---

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

#### **A. Pemantauan Berkelanjutan.**

Pemantauan sistem pengendalian intern bertujuan untuk menilai kinerjanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Pemantauan sistem pengendalian intern juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian yang dicanangkan tersebut telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut :

1. Dokumen renja perubahan 2024;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan Dokumentasi dengan Tim TPID terkait ketersediaan data pangan
3. Tanda terima surat himbuan Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbuan pangan lokal
4. Data penduduk rawan pangan dari Dinas Sosial
5. Laporan rapat koordinasi dengan bidang terkait Kesehatan hewan
6. Laporan rapat koordinasi desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan
8. Laporan pelaksanaan kegiatan mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi

9. Laporan pendampingan dokumentasi pendampingan P2L;
10. Laporan pendampingan dokumentasi pendampingan kelompok ternak;

#### **B. Evaluasi Terpisah**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

#### **C. Pelaksanaan Tindak lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

#### **D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada walikota.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

---

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680223 199208 1 002

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/ RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN  
( RTP ATAS CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun Penilaian : 2024

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>Kepemimpinan yang kondusif</b>				
1	Pendaftaran online Puskesmas untuk dibenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap	1. Perbaiki sistem pendaftaran online 2. Melengkapi sarana prasarana Puskesmas secara bertahap	Kepala Dinas	November 2022	
<b>II</b>	<b>Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat</b>				
1	Terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2.289.300,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)	Kepala Dinas Katahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakartam memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran segera menarik kelebihan pembayaran kepada pegawai bersangkutan sebesar Rp2.289.300,- (Dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya disetor ke Rekening Kas Daerah.	Kepala Dinas	November 2023	

**Daftar Risiko Prioritas Operasional OPD  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Surakarta				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis OPD		: Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil				
Urusan Pemerintahan		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Operasional OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
	Program : PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
1	Konsumsi protein belum ideal	ROO.24.09.12.02	13	Sekretaris/Kepala Bidang	Harga pangan yang naik menyebabkan tingkat konsumsi protein menurun	Konsumsi energi kurang dari 57 gram/kap/hari
2	Ketersediaan protein kurang	ROO.24.09.12.04	4	Sekretaris/Kepala Bidang	Prediksi iklim yang mempengaruhi produksi pangan di daerah pemasok yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Surakarta	Ketersediaan pangan terganggu
3	Konsumsi energi menurun	ROO.24.09.12.01	4	Sekretaris/Kepala Bidang	Harga pangan yang naik menyebabkan tingkat konsumsi protein menurun	Konsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/kap/hari
4	Ketersediaan energi kurang	ROO.24.09.12.03	4	Sekretaris/Kepala Bidang	Prediksi iklim yang mempengaruhi produksi pangan di daerah pemasok yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Surakarta	Ketersediaan pangan terganggu

	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
5	Laporan ketersediaan kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya	ROO.24.09.12.05	13	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Data ketersediaan kurang valid dan tidak tepat waktu; tidak semua distributor dapat memberikan data	Data yang disajikan hanya berupa perkiraan
	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					
6	Tidak seimbangnya kontribusi energi dari serealida terhadap kelompok pangan lainnya	ROO.24.09.12.07	4	Sekretaris/Kepala Bidang	Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi beras masih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain (jagung, kentang, ketela pohon, ketela rambat dll)	Ketersediaan beras harus selalu ada dengan jumlah yang mencukupi
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia					
7	Jumlah Toko Mitra Tani yang dikembangkan dipengaruhi oleh Jumlah Fasilitas Distribusi	ROO.24.09.12.06	4	Sekretaris/Kepala Bidang	Menurunnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan murah	TTI tidak bisa dikembangkan
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
8	Konsumsi pangan lokal masih rendah	ROO.24.09.12.08	6	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Masih kurangnya inovasi masyarakat dalam pengolahan pangan lokal.	Produk pangan lokal kurang diminati
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
9	Penduduk rawan pangan belum semua tertangani	ROO.24.09.12.09	13	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	Penduduk rawan pangan tidak semua dapat tertangani
	Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					



10	Ternak banyak yang terkena penyakit dan mati	ROO.24.09.12.10	8	Sekretaris/Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak	Manajemen pemeliharaan ternak tidak berjalan secara maksimal
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
11	Penumbuhan kegiatan P2L yang rendah	ROO.24.09.12.11	13	Sekretaris/Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pertanian	Pemenuhan kebutuhan pangan dari P2L untuk stunting kurang
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					
12	Produksi bibit / benih berkurang karena indukan yang terbatas	ROO.24.09.12.12	8	Sekretaris/Kepala Bidang	Prosentase Keberhasilan benih / bibit yang dihasilkan menurun	Benih /bibit yang dihasilkan menurun
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					
13	munculnya penyakit hewan baru atau reinfeksi penyakit hewan di suatu wilayah	ROO.24.09.12.14	4	Sekretaris/Kepala Bidang	tidak dilakukan monitoring perkembangan penyakit yang ditangani	terjadinya penularan penyakit dalam satu kandang/wilayah
14	Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit hewan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	ROO.24.09.12.13	8	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	tidak dilakukan monitoring kegiatan pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit	Ternak mati dan terjadi penurunan populasi ternak
	Program : PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
15	Perizinan usaha tidak dapat terfasilitasi	ROO.24.09.12.15	4	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	persyaratan teknis dan administasi yang sulit terpenuhi	pelaku usaha tidak berizin
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
16	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sebagai kewajiban setelah izin usaha diterbitkan	ROO.24.09.12.16	6	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Anggapan pelaku usaha bahwa setelah izin usaha keluar maka kewajiban sudah selesai	pelanggaran terhadap izin usaha

	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
17	Bantuan produk olahan ikan tidak sampai dikonsumsi balita stunting	ROO.24.09.12.17	8	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kurangnya pengetahuan orang tua balita stunting tentang nilai gizi ikan dari produk olahan ikan yang diberikan	Jumlah balita stunting tidak mengalami penurunan

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**  
NIP : 196802231992081002

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
RTP atas Hasil Identifikasi Risiko Operasional OPD  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Surakarta						
Tahun Penilaian		: 2024						
Tujuan Strategis OPD		: Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil						
Urusan Pemerintahan		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	E\ KE\ TE	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Risiko Operasional OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
	Program : PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
1	Konsumsi protein belum ideal	ROO.24.09.12.02	Sosialisasi B2SA, pemberian contoh menu B2SA	Frekuensi sosialisasi dan pemberian menu kurang	E	Menambah volume sosialisasi dan pemberian contoh menu B2SA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28-06-2024
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
2	Laporan ketersediaan kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya	ROO.24.09.12.05	dilakukan pengecekan lapangan, mengundang distributor untuk memberikan pemahaman dan menyediakan google form untuk penyediaan data.	Distributor tidak memberikan data yang diminta	KE	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29-03-2024

	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
3	Konsumsi pangan lokal masih rendah	ROO.24.09.12.08	Sosialisasi kepada anak sekolah tentang menu pangan lokal dan pemberian contoh menu pangan lokal, pelatihan pengolahan pangan lokal kepada PKK, KMP, KWT	Masih kurangnya minat masyarakat terhadap pangan lokal	E	Penerapan SE Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbauan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29-03-2024
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
4	Penduduk rawan pangan belum semua tertangani	ROO.24.09.12.09	Koordinasi dengan Dinsos mengenai data masyarakat rawan pangan, Penyusunan peta FSVA	Dinamika perubahan data penerima.	E	Update data penduduk rawan pangan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27-09-2024
	Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
5	Ternak banyak yang terkena penyakit dan mati	ROO.24.09.12.10	Pendampingan dan monitoring kepada kelompok ternak	Masih terdapat ternak yang mati karena penularan penyakit.	KE	Koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27-09-2024
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
6	Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit hewan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	ROO.24.09.12.13	Desinfeksi pasar hewan, RPH dan unit usaha hewan	Kegiatan desinfeksi tidak bisa dilaksanakan secara rutin	KE	Menambah volume desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27-09-2024
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							

7	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sebagai kewajiban setelah izin usaha diterbitkan	ROO.24.09.12.16	Pengawasan persyaratan izin usaha yang sudah terdaftar di aplikasi perizinan.	Izin usaha terbit otomatis dan ketika dilakukan pengawasan tidak sesuai persyaratan teknis.	E	Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan di Kota Surakarta.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10-12-2024
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
8	Bantuan produk olahan ikan tidak sampai dikonsumsi balita stunting	ROO.24.09.12.17	Produk olahan langsung diberikan kepada balita stunting.	Makanan yang diberikan tidak langsung di konsumsi oleh balita stunting	E	Balita stunting langsung mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	02-12-2024
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
9	Penumbuhan kegiatan P2L yang rendah	ROO.24.09.12.11	Pelatihan tematik P2L, Monitoring P2L	Belum semua anggota kelompok mengikuti pelatihan dan monitoring.	E	Pendampingan dari mulai CPCL sampai pasca panen.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10-12-2024
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
10	Produksi bibit / benih berkurang karena indukan yang terbatas	ROO.24.09.12.12	Memberikan bantuan ternak ayam	Kurangnya pengetahuan peternak tentang budidaya ternak	KE	Pemberian pendampingan kepada kelompok ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10-12-2024

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**  
NIP : 196802231992081002

**Rencana Komunikasi dan Informasi Pengendalian Operasional OPD  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Surakarta						
Tahun Penilaian	: 2024						
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil						
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Program : PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
1	Menambah volume sosialisasi dan pemberian contoh menu B2SA	Usulan menambah anggaran melalui renja perubahan 2024	Bidang Ketahanan Pangan	Sekretariat	28-06-2024		
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
2	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait.	Rapat koordinasi	Bidang Ketahanan Pangan	Tim TPID	31-05-2024		
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
3	Penerapan SE Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbauan pangan lokal	Surat himbauan konsumsi pangan lokal	Bidang Ketahanan Pangan	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	29-02-2024		



	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
4	Update data penduduk rawan pangan.	Surat permohonan data ke Dinsos	Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Sosial	31-05-2024		
	Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
5	Koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan.	Melakukan rapat koordinasi	Bidang Pertanian dan Perikanan	Bidang veteriner	15-08-2024		
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
6	Menambah volume desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha	Menyusun Jadwal Pelaksanaan kegiatan	Bidang veteriner	Petugas desinfeksi, RPH dan peternak	29-02-2024		
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
7	Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan di Kota Surakarta.	Rapat koordinasi	Bidang Veteriner	DPMPSTP	27-09-2024		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
8	Balita stunting langsung mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi	Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan materi sosialisasi	Bidang Pertanian dan Perikanan	Peserta sosialisasi gemarikan	30-09-2024		
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						
9	Pendampingan dari mulai CPCL sampai pasca panen.	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan P2L	Bidang Pertanian dan Perikanan	Kelompok P2L	31-01-2024		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						

10	Pemberian pendampingan kepada kelompok ternak	Laporan pendampingan kelompok ternak	Bidang Pertanian dan Perikanan	Kelompok peternak	27-12-2024		
----	---	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------	--	--

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**  
NIP : 196802231992081002

**Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Operasional OPD  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Surakarta				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis OPD		: Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil				
Urusan Pemerintahan		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	Program : PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
1	Menambah volume sosialisasi dan pemberian contoh menu B2SA	Dokumen renja perubahan 2024	Bidang Ketahanan Pangan	27-09-2024		
	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
2	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait.	Laporan hasil rapat Daftar hadir Dokumentasi	Bidang Ketahanan Pangan	28-06-2024		
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
3	Penerapan SE Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbauan pangan lokal	Tanda terima surat himbauan	Bidang Ketahanan Pangan	29-03-2024		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
4	Update data penduduk rawan pangan.	Data penduduk rawan pangan dari Dinas Sosial	Bidang Ketahanan Pangan	28-06-2024		

	Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
5	Koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan.	Laporan rapat koordinasi	Bidang Pertanian dan Perikanan	30-09-2024		
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
6	Menambah volume desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha	Laporan pelaksanaan kegiatan Dokumentasi	Bidang veteriner	10-12-2024		
	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
7	Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan di Kota Surakarta.	Laporan pelaksanaan kegiatan	Bidang Veteriner	10-12-2024		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
8	Balita stunting langsung mengkonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi	Laporan pelaksanaan kegiatan	Bidang Pertanian dan Perikanan	10-12-2024		
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
9	Pendampingan dari mulai CPCL sampai pasca panen.	Laporan pendampingan dokumentasi	Bidang Pertanian dan Perikanan	27-12-2024		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					
10	Pemberian pendampingan kepada kelompok ternak	Laporan pendampingan Dokumentasi	Bidang Pertanian dan Perikanan	27-12-2024		

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**  
NIP : 196802231992081002

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN LINGKUP OPERASIONAL OPD**  
**REGISTER RESIKO**

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB		SUMBER	URAIAN DAMPAK		PIHAK YANG TERKENA	D	K	SKOR						
Tujuan : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil																		
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman																		
Program : PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																		
Indikator Kinerja : Konsumsi protein perkapita	Konsumsi protein belum ideal	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Harga pangan yang naik menyebabkan tingkat konsumsi protein menurun	Eksternal	UC	Konsumsi energi kurang dari 57 gram/kap/hari	Masyarakat Kota Surakarta	ROO.24.09.12.02	3	3	13	Kurang Signifikan/ Kecil - Jarang	Sosialisasi B2SA, pemberian contoh menu B2SA	E	Frekuensi sosialisasi dan pemberian menu kurang	Menambah volume sosialisasi dan pemberian contoh menu B2SA	28-06-2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																		
Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap	Laporan ketersediaan kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Data ketersediaan kurang valid dan tidak tepat waktu; tidak semua distributor dapat memberikan data	Eksternal	UC	Data yang disajikan hanya berupa perkiraan	Masyarakat Kota Surakarta	ROO.24.09.12.05	3	3	13	Tidak Signifikan/ Sangat Kecil - Sering	dilakukan pengecekan lapangan, mengundang distributor untuk memberikan pemahaman dan menyediakan google form untuk penyediaan data.	KE	Distributor tidak memberikan data yang diminta	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait.	29-03-2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
Indikator Kinerja : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Konsumsi pangan lokal masih rendah	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Masih kurangnya inovasi masyarakat dalam pengolahan pangan lokal.	Eksternal	UC	Produk pangan lokal kurang diminati	Masyarakat	ROO.24.09.12.08	2	3	6	Kurang Signifikan/ Kecil - Sering	Sosialisasi kepada anak sekolah tentang menu pangan lokal dan pemberian contoh menu pangan lokal, pelatihan pengolahan pangan lokal kepada PKK, KMP, KWT	E	Masih kurangnya minat masyarakat terhadap pangan lokal	Penerapan SE Kota Cerdas Pangan tentang penyediaan pangan lokal pada menu rapat - rapat dengan penyusunan surat himbauan pangan lokal	29-03-2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

Indikator Kinerja : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk rawan pangan belum semua tertangani	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	Eksternal	UC	Penduduk rawan pangan tidak semua dapat tertangani	Warga Rawan Pangan	ROO.24.09.12.09	3	3	13	Kurang Signifikan/ Kecil - Jarang	Koordinasi dengan Dinsos mengenai data masyarakat rawan pangan, Penyusunan peta FSVA	E	Dinamika perubahan data penerima.	Update data penduduk rawan pangan.	27-09- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																		
Indikator Kinerja : Populasi ternak	Ternak banyak yang terkena penyakit dan mati	Sekretaris/Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak	Eksternal	UC	Manajemen pemeliharaan ternak tidak berjalan secara maksimal	Masyarakat	ROO.24.09.12.10	3	2	8	Signifikan/ Besar - Jarang	Pendampingan dan monitoring kepada kelompok ternak	KE	Masih terdapat ternak yang mati karena penularan penyakit.	Koordinasi dengan bidang terkait kesehatan hewan.	27-09- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
Indikator Kinerja : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Penumbuhan kegiatan P2L yang rendah	Sekretaris/Kepala Bidang	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pertanian	Eksternal	UC	Pemenuhan kebutuhan pangan dari P2L untuk stunting kurang	Balita Stunting	ROO.24.09.12.11	3	3	13	Signifikan/ Besar - Sangat Sering	Pelatihan tematik P2L, Monitoring P2L	E	Belum semua anggota kelompok mengikuti pelatihan dan monitoring.	Pendampingan dari mulai CPCL sampai pasca panen.	10-12- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
Indikator Kinerja : Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Produksi bibit / benih berkurang karena indukan yang terbatas	Sekretaris/Kepala Bidang	Prosentase Keberhasilan benih / bibit yang dihasilkan menurun	Eksternal	UC	Benih /bibit yang dihasilkan menurun	Masyarakat	ROO.24.09.12.12	3	2	8	Signifikan/ Besar - Sering	Memberikan bantuan ternak ayam	KE	Kurangnya pengetahuan peternak tentang budidaya ternak	Pemberian pendampingan kepada kelompok ternak	10-12- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
Indikator Kinerja : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Bantuan produk olahan ikan tidak sampai dikonsumsi balita stunting	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Kurangnya pengetahuan orang tua balita stunting tentang nilai gizi ikan dari produk olahan ikan yang diberikan	Eksternal	C	Jumlah balita stunting tidak mengalami penurunan	Balita Stunting	ROO.24.09.12.17	3	2	8	Kurang Signifikan/ Kecil - Jarang	Produk olahan langsung diberikan kepada balita stunting.	E	Makanan yang diberikan tidak langsung di konsumsi oleh balita stunting	Balita stunting langsung mengonsumsi olahan ikan dan sosialisasi dari ahli gizi	02-12- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
Indikator Kinerja : Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	Pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit hewan tidak dapat dilaksanakansacara efektif	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	tidak dilakukan monitoring kegiatan pencegahan penyakit dan pencegahanpenyakit	Internal	C	Ternak mati dan terjadi penurunan populasi ternak	masyarakat	ROO.24.09.12.13	3	2	8	Kurang Signifikan/ Kecil - Jarang	Desinfeksi pasar hewan, RPH dan unit usaha hewan	KE	Kegiatan desinfeksi tidak bisa dilaksanakan secara rutin	Menambah volume desinfeksi pasar ternak/RPH dan unit usaha	27-09- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

Indikator Kinerja : Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Pelaku usaha belum memenuhi persyaratan sebagai kewajiban setelah izin usaha diterbitkan	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT	Anggapan pelaku usaha bahwa setelah izin usaha keluar maka kewajiban sudah selesai	Eksternal	C	pelanggaran terhadap izin usaha	Masyarakat	ROO.24.09.12.16	2	3	6	Kurang Signifikan/ Kecil - Sering	Pengawasan persyaratan izin usaha yang sudah terdaftar di aplikasi perizinan.	E	Izin usaha terbit otomatis dan ketika dilakukan pengawasan tidak sesuai persyaratan teknis.	Koordinasi dengan OPD penanggungjawab perizinan di Kota Surakarta.	10-12- 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
---	---	---	---	-----------	---	---------------------------------------	------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	--	--	----------------	---

Surakarta, 23 November 2023  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Surakarta

Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si  
NIP : 196802231992081002